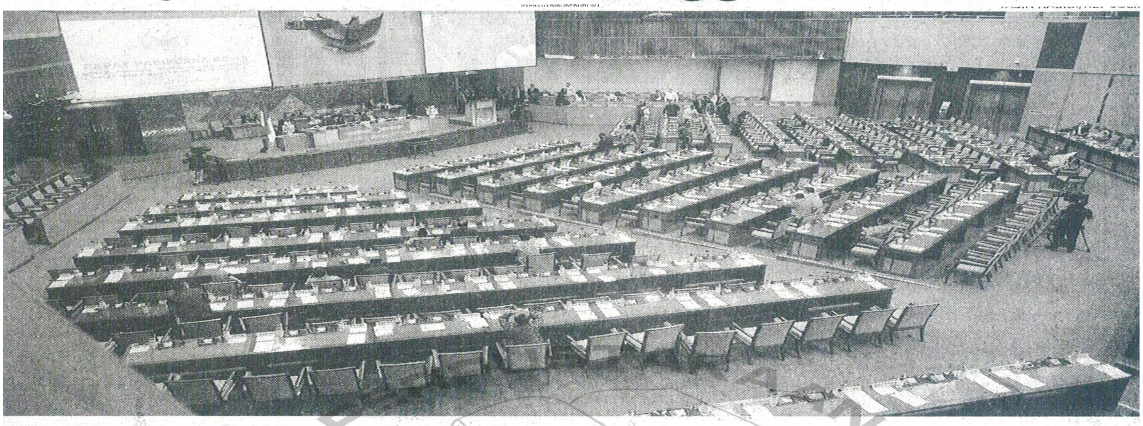
KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Menyoal kenaikan anggaran kunker
**Tanggal** : Kamis, 14 September 2017
**Surat Kabar** : Republika
**Halaman** : 21



# Menyoal Kenaikan Anggaran Kunker



1Sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

DPR mengusulkan kenaikan anggaran kunker dewan ke luar negeri sekitar 70 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Berdasarkan usulan, anggaran kunker ke luar negeri dinaikkan dari Rp 201,7 miliar di 2017 menjadi Rp 343,676 miliar untuk 2018.

Usulan kenaikan anggaran kunker ini langsung saja mengundang polemik. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR melalui Sekretaris Fraksi Yandri Susanto meminta pengkajian ulang usulan kenaikan anggaran kunker tersebut. Menurut dia, kajian ulang diperlukan untuk menilai perlu tidaknya kenaikan anggaran kunker mencapai 70 persen itu.

Padangan lebih halus disampaikan mantan ketua DPR) Agung Laksono. Menurut Agung, usulan kenaikan anggaran kunker harus disertai proses yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pemilihan kunker anggota dewan juga harus dilakukan secara selektif. Dengan kata lain, Agung meminta setiap anggota dewan yang ke luar negeri harus menyampaikan ke publik mengenai keseluruhan proses dan hasil kunker. Hal itu perlu dilakukan lantaran anggota dewan sejatinya mempunyai atasan, yakni rakyat.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pertimbangan usulan kenaikan anggaran kunker ke luar negeri karena menyesuaikan kurs mata uang dolar AS. Selain itu, usulan kenaikan juga didasarkan atas upaya peningkatan kinerja dan diplomasi parlemen. Jadi, kata Taufik, adanya kenaikan anggaran bukan berarti ada perubahan dari intensitas kunker anggota dewan ke luar negeri.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, kenaikan anggaran kunker ke luar negeri tak akan diakali anggota dewan. Lagipula, anggota DPR memang perlu melakukan studi banding ke negara lain. Karena itu, dia meminta publik tidak mempermasalahkan masalah kunker DPR ke luar negeri.

Lalu, bagaimana pandangan publik mengenai isu ini? Berikut sejumlah komentar yang diterima redaksi *Republika* atas topik "Usulan Kenaikan Anggaran Kunjungan Kerja Anggota DPR ke Luar Negeri". n **ed:** eh ismail

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

## Jangan Aji Mumpung

**Andriono Kurniawan,** Guru SMA Islam NFBS Cinangka, Serang, Banten



Sudah saatnya anggota DPR kita memperbaiki citra dengan melakukan aksi "bersih" yang patut diteladani. Kunker ke luar negri amatlah bermanfaat jika dilakukan secara proporsional dan profesional. Proporsional di sini mengandung arti bahwa agenda kunjungan kerja tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan uang rakyat. Transparansi penggunaan dana operasional sebaiknya mulai dibudayakan dengan maksud menekan pemborosan dan memberi contoh positif bahwa wakil rakyat kini cukup memiliki amanah. Profesional berarti bahwa kunjungan tersebut benar benar dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan misi kunker sehingga tujuan kunker benar benar tercapai. Jangan sampai fenomena negatif yang diketahui khalayak tentang kunker kunker sebelumnya ternyata terulang kembali. Kami rakyat Indonesia tidak ingin lagi melihat para wakil rakyat bersikap aji mumpung. Seperti mereka yang berpikir bahwa mumpung jadi anggota DPR, maka mengagendakan banyak kunker ke luar negeri dengan menyertakan anggota keluarga. Mumpung menjadi anggota DPR, maka seenaknya menghabiskan uang rakyat. Ingatlah, wahai anggota DPR bahwa tidak ada istilah "dana pemerintah" untuk setiap rupiah yang Anda gunakan, namun itu adalah "uang rakyat" yang diperuntukkan "untuk rakyat" yang diawasi penggunaannya "oleh rakyat".

## Uang Negara, Uang Rakyat

**Arkan Paradise,** Universitas Darussalam Gontor



Walaupun dengan kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri dapat mempererat relasi dengan negara lain dan memperkaya substansi legislasi, tetapi banyak kasus yang terkait dengan kunker itu sendiri. Misalnya, tugas negara diselewengkan untuk jalan-jalan atau kepentingan pribadi. Ditambah lagi dengan usulan kenaikan anggaran untuk kunker yang mencapai kurang lebih 70 persen. Itu bukanlah uang yang sedikit. Dengan beralasan mahalnya tiket pesawat dan mahalnya biaya penginapan, kenaikan anggaran ini perlu dirundingkan secara matang-matang. Karena anggaran itu menggunakan uang negara dan uang negara berasal dari uang rakyat. Jika memang kenaikan itu terlaksana, maka prosesnya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dan pemilihannya harus dilakukan dengan selektif. Kegiatan kunker ini harus dipublikasikan, agar rakyat bisa mengetahui bahwa uang mereka tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena atasan pemerintah yang hakiki adalah rakyat.

## Sangat tidak Berempati

**Novo Indarto,** Magelang, Jawa Tengah



Di saat eksekutif mengencangkan ikat pinggang dalam rangka efisiensi anggaran negara, menurut saya usulan kenaikan anggaran tersebut sangat tidak berempati. Zaman sudah sangat maju, studi banding menggunakan teknologi internet kan sebenarnya sudah cukup. Pembicaraan bisa pakai email. Kalaupun harus ada pembicaraan langsung, tidak perlu satu rombongan kan yang ikut? Cukup mengirim perwakilan satu-dua orang saja. Dengan begitu, anggaran kunjungan kerja sudah cukup dan tidak perlu dinaikkan. Zaman susah *gini* harusnya para wakil rakyat sudah tidak waktunya lagi menghambur-hamburkan uang rakyat, tapi bahu-membahu memajukan bangsa.

## Lihat Dulu Programnya

**Faiq Aminuddin,** Tedunan, Wedung, Demak



Perjalanan dan kegiatan ke luar negeri tentu membutuhkan anggaran yang besar. Fasilitas trasportasi dan akomodasi yang semakin canggih tentu berdampak pada kenaikan harga. Dan sudah sewajarnya bila anggaran tahun ini lebih besar dari anggaran tahun lalu karena ada penurunan nilai uang dan kenaikan harga. Yang tidak wajar adalah bila ada program yang diragukan manfaatnya, tidak dihentikan, *kok* malah ditingkatkan. Jadi, dilihat dulu programnya.

## Efesiensi Anggaran

**Aji Setiawan,** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta



Usulan kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPR menuai polemik. Bagaimana tidak? selama ini, DPR dipandang sebagai lembaga yang belum menunjukkan indeks kepuasan publik. DPR belum merepresentasikan keinginan khalayak. Hal tersebut mengindikasikan banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Penambahan anggaran kunjungan kerja tanpa diiringi peningkatan kinerja hanya akan membuat citra DPR semakin buruk. Dengan berbagai alasan yang mereka miliki kita harus menanyakan seberapa efektif dan efesien anggaran tersebut digunakan. Jangan sampai dana yang besar tersebut digunakan untuk *plesiran* ke luar negeri dengan dalih kunjungan kerja.

Selaku anggota dewan yang terhormat, sudah seharusnya melakukan kinerja dengan maksimal. Prioritaskan pendanaan untuk menyerap aspirasi masyarakat, terjun langsung ke daerah, berdialog untuk mendengar keluhan dan permasalahan rakyat. Dengan begitu, diharapkan anggota DPR dapat menjadi pionir perubahan tata kelola kehidupan bermasyarakat. Harapan kita, DPR menjadi lembaga yang efesien menggunakan anggaran.

## Kuesioner Hasil Kunjungan

**Ridholloh Ismat,** Mahasiswa Doktoral (S3) Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta



Hampir tidak mungkin menjalankan sebuah mesin transportasi besar tanpa bahan bakar yang juga membutuhkan biaya besar (mahal). Seperti transportasi pesawat misalnya, tanpa bahan bakar avtur yang saat ini mencapai Rp 1,3 miliar per tahun untuk satu maskapai penerbangan. Demikian halnya dalam dunia pendidikan. Mustahil melaksanakan pendidikan yang bermutu jika tanpa melalui proses administrasi yang lengkap dan mutakhir.

Kelengkapan pembelajaran dan pendidikan yang masuk dalam kategori sarana dan prasarana ini tentunya memakan biaya yang tidak sedikit, sekalipun sekolah tersebut berlabel "gratis". Sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah tidak berarti sekolah tersebut tidak membutuhkan biaya besar. Hanya saja, biaya itu digantungkan di leher pemerintah bukan para orang tua siswa.

Nampaknya, dua contoh di atas dapat pula diresilisasikan dalam dunia pemerintahan. Jika ingin adanya perubahan berarti untuk negeri, rasanya wajar jika harus menguras biaya yang besar.

Namun, tetap harus realistis dan terbuka. Di sisi lain, kita harus percaya kepada wakil rakyat bahwa mereka adalah orang terpilih yang profesional menjalankan tugas kenegaraan. Berita yang beredar selama ini tentang ketidakseriusan anggota DPR dalam melaksanakan kunjungan kerja luar negeri bisa diatasi dengan penambahan draft hasil kunjungan berupa kuesioner yang bisa dibuat oleh para ahli.

Selain itu, di zaman yang serba keterbukaan ini, sudah patut bila hasil kunjungan tersebut dipublikasikan poin pentingnya agar stigma negatif yang selama ini menempel pada anggota DPR yang melakukan kunjungan ke luar negeri untuk hura-hura segera terbantahkan.

## Utamakan Tugas yang Primer

**Maulida 'Izzatu Amin,** Mahasiswi Aqidah Filsafat Islam, Unida Gontor



Layaknya seorang produsen barang dagang, semakin berkualitas barang yang ia hasilkan, maka semakin tinggi pulalah harga yang berhak ia patok. Tetapi, apa jadinya jika barang yang dijual penuh dengan cacat dan kekurangan di sana-sini, sedangkan harga yang ditawarkan melebihi batas wajar? Pastilah akan tersingkirkan dan tertolak oleh konsumen. Dalam kasus pengajuan penambahan anggran kunjungan luar negeri oleh DPR ini, saya rasa juga membutuhkan tindak evaluasi yang mendalam.

Berangkat dari evaluasi tahun sebelumnya, banyaknya kunjungan luar negeri justru mengarah pada terbengkalainya tugas-tugas yang berskala primer dan priori di dalam badan DPR sendiri. Bisa dihitung dengan jari RUU yang berhasil mereka rampungkan menjadi UU di tahun 2016 dari target awal 50 RUU. Seharusnya hal yang demikian tidak bisa dibenarkan.

Memperbaiki yang sekunder, tetapi menelantarkan yang primer. Pengajuan penambahan anggaran sebesar 70 persen bisa disebut tidak imbang dengan produktivitas kinerja yang telah dilaksanakan. Dalam ini, mental kita semua seharusnya juga terdidik untuk tidak berjiwa kerdil dengan meminta lebih sebelum memberikan yang lebih pula.

Bahkan, seharusnya ada banyak atau sedikitnya dana, tak menghalangi semangat loyalitas dan totalitas dalam berdedikasi. Sebab, pengabdian kepada negara seharusnya tidak terpaku pada nominal materi. Seyogyanya, ia dilandasi dengan semangat rela berkorban, bergerak dan menggerakkan serta berjuang dan memperjuangkan.

## Evaluasi Hasil Kinerja Tahun Lalu

**Ahmat Rondi Toyib,** Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP Al Hikmah Surabaya



Pemerintah perlu mengkaji ulang tentang usulan kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri yang mencapai sekitar 70 persen dari dana RAPBN tahun lalu. Apakah anggaran dana ini memang digunakan untuk kunjungan kerja murni atau ada yang bersifat pribadi? Sebaiknya pemerintah mengevaluasi terlebih dahulu hasil kinerja DPR tahun-tahun sebelumnya, kemudian pemerintah baru memutuskan anggaran dana yang diusulkan DPR tahun ini. Ini adalah 'strategi jitu' yang seharusnya dilakukan pemerintah.

Jika tidak, 'dikhawatirkan' anggaran akan digunakan untuk kepentingan pribadi anggota DPR. Jika kenaikan dana setiap tahun tidak memberikan kenaikan hasil kinerja, pemerintah harus menolak dan meminta DPR untuk menyusun anggaran yang memang diperlukan saja. Untuk itu, pemerintah harus benar-benar jeli dan sangat teliti agar peluang korupsi oleh badan-badan pemerintah tidak terjadi dengan dana berlebih yang diusulkan.

## Perlu Dikaji Ulang

**Soritua Ahmad Ramdani Harahap,** Mahasiswa Ekonomi Islam, Unida Gontor



DPR sebagai lembaga legislatif yang dianggap sebagai representasi masyarakat memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pada akhir-akhir ini, DPR melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengajukan kenaikan anggaran kunker ke luar negeri menjadi Rp 343,5 miliar untuk 2018. Anggaran ini naik Rp 141,8 miliar dari 2017, yang bernilai Rp 201,7 miliar. DPR mengusulkan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri naik pada RAPBN 2018.

Usulan ini sepertinya kurang tepat ditengah lemahnya ekonomi dinegara kita. Seharusnya penggunaan anggaran dipakai untuk menyerap aspirasi rakyat ketimbang kunker ke luar negeri. Kita harus memprioritaskan anggaran untuk menyerap aspirasi, turun langsung bertemu masyarakat dan dialog dengan mereka.

Manfaatnya jauh lebih besar daripada kunjungan ke luar negeri. Walaupun kunker luar negeri harus tetap dilaksanakan, akan tetapi harus dibatasi dan benar-benar membawa hasil yang baik ketika pulang ke Indonesia.

## Tolak Usulan

**Diko Ahmad Riza Primadi,** Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang



Dari semua kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air, lembaga DPR merupakan salah satu lembaga negara yang anggota maupun pimpinannya banyak tersandung kasus korupsi.

Tentunya korupsi itu banyak merugikan negara, bahkan hingga triliunan rupiah. Usulan kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri yang akhir-akhir ini didengungkan merupakan hal yang harus disikapi pemerintah dengan tegas.

Menolak usulan kenaikan anggaran adalah jalan yang tepat diambil oleh pemerintah mengingat kinerja DPR yang dinilai kurang maksimal dalam mensejahterakan rakyat. Selain itu, kenaikan anggaran tersebut merupakan sesuatu hal yang kurang tepat, melihat pertumbuhan ekonomi nasional yang lesu di tengah persaingan global. Jadi, sebaiknya kita harus menolak usulan kenaikan anggaran kunker tersebut.